

**KOLABORASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DENGAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
DALAM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI  
DI KOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

Ryando Noel Manuhutu  
NPP. 31.0982

*Asal pendaftaran Kota Ambon, Provinsi Maluku  
Program studi : Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : [riandonoel@gmail.com](mailto:riandonoel@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Drs. Florianus Aser, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem statement / Background (GAP)** : This research is motivated by the high potential for security disturbances and public order in the city of Ambon, as well as the suboptimal cooperation between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum in the implementation of early warning in the city of Ambon. **Purpose** : The aim of this research is to analyze the collaboration between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum in the city of Ambon, as well as to elucidate the driving factors and barriers in the implementation of early warning in Ambon. **Method** : This research employs a qualitative descriptive method to analyze and depict the collaboration process using the Collaborative Governance theory according to Ansel and Gash. Data collection is conducted through interview techniques, observation, and documentation. **Result** : The facts on the ground indicate that the collaboration between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum in Ambon has not been optimal. In the implementation of early warning, there is a kesbangpol agency formed to assist the government in gathering field information. On the other hand, the function of Satlinmas in early warning implementation is not functioning, and the formation of the Community Early Warning Forum is only established at the city level and has not reached the district and village levels. **Conclusion** : The collaboration between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum has not been optimal. This is because the establishment of the Community Early Warning Forum was only ratified in 2023, resulting in only one direct meeting between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum, which has yet to yield policy recommendations in early warning implementation.

**Keywords** : Collaboration, Community Early Warning Forum, Early Warning, National Unity and Politics Agency

**ABSTRAK**

**Permasalahan / Latar Belakang (GAP)** : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban Umum di Kota Ambon, serta belum optimalnya kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon. **Tujuan** : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon, serta menjelaskan faktor pendorong dan

Penghambat dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon. **Metode** : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis serta menggambarkan jalannya kolaborasi menggunakan teori Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan** : Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Ambon belum berjalan dengan optimal, adapun dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini terdapat agen kesbangpol yang di bentuk untuk membantu pemerintah dalam mencari informasi dilapangan ,di lain sisi fungsi Satlinmas dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini tidak berjalan dan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru dibentuk pada tingkat kota dan belum sampai pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. **Kesimpulan** : Kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat belum berjalan dengan optimal hal ini di karenakan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru di sahkan pada tahun 2023 sehingga pertemuan langsung yang terjadi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru terjadi 1 (satu) kali dan belum menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini.

**Kata Kunci** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kewaspadaan Dini, Kolaborasi

## I. PENDAHULUAN.

### 1.1. Latar Belakang.

Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kota Ambon masih tergolong tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan dari Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease pada Tahun 2021 ke 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada kasus penganiayaan, pencurian dan kekerasan bersama, jumlah kasus penganiayaan pada tahun 2021 berjumlah 282 kasus meningkat menjadi 365 kasus pada tahun 2022, begitu pula kasus pencurian meningkat dari 191 kasus menjadi 326 kasus, dan juga kasus kekerasan bersama meningkat dari 200 kasus menjadi 219 kasus pada tahun 2022, selain itu laporan dari badan laporan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon menunjukkan terdapat beberapa daerah kecamatan yang rawan terjadi konflik sosial diantaranya Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Sirimau, hal ini di buktikan dengan terjadinya beberapa kejadian konflik sosial, pada tahun 2021 terjadi konflik sosial pada daerah Aer Salobar Kecamatan Nusaniwe antara dua kelompok pemuda dipicu oleh adanya provokasi (MalukuTerkini.com , 2021), selanjutnya pada tahun 2022 terjadi konflik sosial pada daerah Batu Merah Kecamatan Sirimau antara dua kelompok pemuda dipicu aksi saling ejek dan pengaruh minuman keras (MalukuTerkini.com , 2022),selain itu pada tahun 2023 terjadi juga konflik sosial yang serupa yaitu antara dua kelompok pemuda pada daerah Kudamati Kecamatan Nusaniwe yang dipicu aksi pemukul dari orang yang tidak dikenal sehingga mengakibatkan salah paham dan akhirnya konflik pun terjadi (ambon.Tribunnews.com , 2023), berdasarkan data data tersebut dapat dilihat bahwa situasi keamanan dan ketertiban di kota ambon masih belum kondusif dilihat dari banyaknya potensi gangguan keamanan yang masih mengancam.

Pencegahan terhadap setiap potensi gangguan keamanan dilakukan melalui penyelenggaraan kewaspadaan dini yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, kewaspadaan dini merupakan serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. berdasarkan permendagri tersebut yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah adalah pemerintah daerah dan masyarakat, unsur pemerintah daerah Kota Ambon yang bertanggung jawab melaksanakan kewaspadaan dini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon, selain itu wujud



partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini adalah dengan di bentuknya sebuah wadah bagi elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara kewaspadaan dini yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus bekerja sama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon, namun pada kenyataannya tingginya angka gangguan keamanan dan ketertiban menunjukkan kerja sama dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini belum berjalan dengan optimal sehingga pencegahan terhadap setiap potensi gangguan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Belum optimalnya kerja sama dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon dapat tergambar dari pernyataan yang di berikan oleh kabid kewaspadaan nasional dan penanganan Konflik ibu Cheryl. V. Tuasun yang menyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih kekurangan tenaga sehingga tidak dapat menjangkau keseluruhan daerah desa/kelurahan yang menjadi titik rawan konflik (FokusMaluku.com), selain itu berdasarkan pernyataan dari bapak pj Wali Kota Ambon pada saat pembukaan acara hari ulang tahun Kota Ambon pada 2023 lalu beliau mengatakan bahwa peningkatan kapasitas dalam penanganan konflik terhadap setiap anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu dilakukan mengingat pembentukan Forum tersebut baru dilakukan sehingga kualitas sumber daya manusia dari setiap anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kegiatan penanganan konflik di Kota Ambon (Ambon.co.id), dengan demikian dapat dilihat bahwa kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Kota Ambon belum optimal di karenakan kurangnya tenaga bantuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, juga kualitas SDM yang belum memadai dikarenakan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini yang baru ditetapkan pada tahun 2023 lalu sehingga pemahaman terkait tugas dan fungsi para anggota Forum Kewaspadaan Dini belum mendalam terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini, dengan tidak optimalnya kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maka penyelenggaraan kewaspadaan dini dalam menangkal setiap potensi gangguan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).**

Berdasarkan kondisi problematik yang terjadi Kota Ambon terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, belum optimalnya kerja sama dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan hal yang paling krusial yang menyebabkan penyelenggaraan kewaspadaan dini untuk menangkal setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat tidak berjalan dengan maksimal, dikarenakan keterbatasan tenaga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan kualitas juga sumber daya manusia dari para anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kota Ambon yang belum baik dikarenakan penetapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru dilaksanakan pada tahun 2023, padahal dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini untuk menangkal setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban adalah pemerintah daerah dan masyarakat, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Namun pada kenyataannya kedua komponen yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon belum dapat bekerja sama secara optimal.

### **1.3. Penelitian Terdahulu.**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penyelenggaraan Kewaspadaan Dini. Penelitian pertama berjudul “Peran Kewaspadaan Dini ‘intelijen’ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan di Daerah”



(Wizani, Dedi.2020), menemukan bahwa Output (hasil) peran Intelijen badan Kesabangpol adalah melaksanakan Kewaspadaan Dini meliputi deteksi dini dan cegah dini dengan menghasilkan laporan dan rekomendasi dalam rangka memberikan peringatan masalah, perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial di masyarakat. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain adalah keterbatasan jumlah personil dan beberapa pegawai yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan intelijen, terbatasnya anggaran operasional dan belum tersosialisasikannya peran Kewaspadaan Dini “Intelijen” Badan Kesabangpol di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Penelitian kedua berjudul “Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa” (Setiabudhi, I Ketut Ray, dkk. 2022), menemukan bahwa forum Kewaspadaan Dini masyarakat diupayakan berfungsi secara efektif untuk menangkap, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang potensi ancaman keamanan, gejala atau kejadian bencana. Konteks tindakan pencegahan dini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pertimbangan pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Selanjutnya penelitian ketiga berjudul “Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas cegah dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019” (Agustina, dkk. 2022), menemukan bahwa 1.Strategi yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini yaitu ; 1). Memasukkan unsur sistem peringatan dini (early warning system), yaitu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas pemerintah, kapasitas sektor swasta, kapasitas komunitas masyarakat melalui dialog kepada masyarakat; 2). Tindakan pencegahan konflik dalam tahap ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta berperan aktif mengajak dialog secara persuasif dan mendengarkan keluhan para pihak dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak; 3). Adanya pendanaan penanganan konflik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah akan memberikan peluang penguatan ketahanan komunitas yang memiliki tujuan melindungi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat warga masyarakat, mengendalikan konflik sosial serta memelihara kearifan lokal yang digunakan untuk memelihara perdamaian.penelitian keempat berjudul “Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Menangani Konflik Sosial di Kelurahan Warakas Jakarta Utara” (Akbar,A.2022) menemukan bahwa pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan pemerintah daerah berupa alokasi anggaran, fasilitas, dan kerja sama dengan instansi terkait telah meningkatkan efektivitas program pencegahan konflik. Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, implementasi kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga.

Penelitian Kelima berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan” (Hakim,L.2020) menemukan bahwa Kontribusi yang diberikan oleh para Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat selama ini sudah cukup baik, baik dari kontribusi tenaga dan pemikiran, kontribusi dana dan sarana yang selama ini ternyata sebagian besar masih menggunakan prasarana dan dana pribadi, walaupun setiap bulannya para anggota mendapatkan honor akan tetapi honor tersebut masih jauh dari harapan atau dapat dikatakan masih di bawah UMP. Penelitian keenam berjudul “Peran Jurnalis Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm) Dalam Mencegah Ekstrimisme Dan Radikalisme Di Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas” (Miryanti,R.2024) menemukan bahwa peran jurnalis sangat signifikan dalam mencegah penyebaran paham-paham radikalisme dan ekstrimisme di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara, Jurnalis telah melakukan fungsi-fungsi 4M FKDM yaitu menjangkau, mengumpulkan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ketujuh berjudul “Kewaspadaan Dini terhadap Paham Radikalisme di Kalangan Remaja” (Amri,.A.D, dkk.



2022) menemukan bahwa Kegiatan penyuluhan tentang paham radikalisme menggunakan metode ceramah, tanya jawab, serta evaluasi dan refleksi. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah siswa kelas X dan XI di SMK Negeri 5 Tebo. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa bertambah dengan adanya diskusi tanya jawab dan siswa mampu menjawab dengan benar. Sosialisasi paham radikalisme yang dilakukan di SMK Negeri 5 Tebo berjalan dengan lancar atas dukungan dari bapak Aipda Dadan Juanda dan Sertu Daryono sebagai pemateri serta antusias para siswa yang sangat bersemangat.

Selain penyelenggaraan Kewaspadaan Dini dalam mencegah gangguan keamanan, ada juga beberapa penelitian terdahulu terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini dalam bidang lain yang menjadi inspirasi dalam penelitian ini, seperti penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid- 19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) (A Riansyah, 2021), menemukan bahwa peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan telah maksimal yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan sehingga seluruh masyarakat telah menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah namun terdapat hambatan yang dihadapi hambatan tersebut diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran COVID-19. selanjutnya penelitian yang berjudul “Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB DBD di Kabupaten Sragen (Pertiwi, J. 2019) menemukan bahwa Proses sistem informasi surveilans DBD sebagai pendukung kewaspadaan dini kejadian Luar biasa di DKK Semarang yang sekarang ini berjalan dilakukan dengan merekap laporan W2 Rumah sakit dan Puskesmas secara rutin satu minggu sekali kemudian dilakukan pengolahan data dengan semi manual, yaitu dengan menggunakan excel melalui format DBD Elektronik.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah.**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian terkait kolaborasi antara Badan Kesatuan bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon adalah yang pertama kali diteliti oleh penulis. Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya hanya berfokus pada salah satu pihak yang menyelenggarakan kewaspadaan dini, dilain sisi banyak penelitian terkait kewaspadaan dini dilakukan dengan berfokus di bidang kesehatan sehingga lebih menitikberatkan kewaspadaan dini sebagai peringatan akan bahaya penyebaran penyakit dibandingkan dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dilain sisi teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu yang mana penulis menggunakan teori collaborative governance sebagai landasan untuk menganalisis jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan menggunakan 6 (enam) dimensi yaitu ; *Starting Condition* / kondisi awal, *Face to Face Dialogue* / dialog tatap muka, *Trust Building* / membangun kepercayaan, *Commitment To Process* / komitmen terhadap proses, *Share Of Understanding* / pemahaman bersama, serta *Intermediate Outcomes* / hasil sementara.(Ansel and Gash, 2008)

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon, serta menjelaskan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon.



## II. METODE.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam mendeskripsikan secara sistematis dan faktual fenomena yang diteliti agar melalui deskripsi tersebut dapat dijelaskan secara detail dan dapat diambil kesimpulan. Metode deskriptif yang digunakan memungkinkan penulis untuk menggunakan pendekatan induktif dengan mengambil kesimpulan secara luas berdasarkan fakta-fakta riil di lapangan. Pendekatan induktif tersebut memungkinkan penulis memperoleh deskripsi permasalahan dari fenomena yang diteliti. Lebih lanjut, tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk memeriksa suatu fenomena secara alamiah dan memungkinkan penulis sebagai instrumen kunci (Creswell, 2016). Maksud dari dipilihnya penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi secara menyeluruh kemudian dideskripsikan dalam kata-kata. Penulis menyelidiki dan berupaya untuk memahami secara mendalam fenomena sosial secara alami.

Kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon akan penulis analisis berdasarkan teori *Colaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash, berdasarkan teori tersebut penulis akan melakukan analisis terhadap proses kolaborasi melalui 6 (enam) dimensi yaitu ; *starting conditions* / kondisi awal, *face to face dialogue* / dialog tatap muka, *trust building* / membangun kepercayaan, *commitment to process* / komitmen terhadap proses, *share of understanding* / pemahaman bersama, dan *intermediate outcomes* / hasil sementara (Ansel and Gash 2008)..

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, yang mana melalui data yang penulis peroleh di lapangan akan penulis olah kemudian data tersebut akan penulis sajikan untuk ditarik kesimpulan secara menyeluruh, penulis melakukan pengumpulan data di Kota Ambon tepatnya di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon, dan juga di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Nusaniwe untuk menganalisis jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informan melalui kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui kejadian di lapangan (Sugiyono, 2020) yang mana merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat untuk menggambarkan jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

### 3.1. *Starting Conditions* / Kondisi Awal.

Kolaborasi antara Badan Kesatuan bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan Kewaspadaan dini di daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di daerah, lewat peraturan tersebut maka setiap daerah wajib menyelenggarakan kewaspadaan dini melalui kerja sama yang dibangun antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, pelaksanaan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah merupakan tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini adalah dengan dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang menjadi wadah bagi elemen masyarakat dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini, di Kota Ambon pembentukan Forum Kewaspadaan Dini baru ditetapkan pada tahun 2023, Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Ambon baru dilakukan pada tingkat kota dan belum sampai pada tingkat kecamatan maupun

desa/kelurahan, adapun SK Pembentukan Dewan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

**Gambar 1.**



dengan ditetapkannya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon, maka kerja sama antara pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan din dapat berjalan, proses kerja sama dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 harus dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data dan informasi, serta pelaporan.

#### A. Pengumpulan Data dan Informasi.

kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait isu-isu yang berkembang di lapangan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama dengan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat saling mengkomunikasikan data dan informasi, juga pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui Koordinasi secara Vertikal dan horizontal, adapun dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi di lapangan badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki agen intelijen yang dibentuk pada tahun 2023 lalu yaitu agen Kesbangpol yang berada disetiap desa/kelurahan di Kota Ambon, disisi lain dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi Satlinmas tidak berfungsi sebagai mana mestinya sehingga tidak terlibat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon.

#### B. Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi.

setiap data dan informasi yang telah diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari setiap agen kesbangpol di lapangan terkait suatu isu atau kejadian yang dapat memicu konflik akan dicocokkan dengan informasi informasi yang diterima oleh mitra mitra lain dalam hal ini juga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat melalui koordinasi, setelah itu informasi tersebut akan dipilah dan diteruskan ke instansi teknis terkait.

#### C. Pelaporan.

setiap informasi yang telah didapatkan dan di validasi selanjutnya akan di teruskan ke instansi teknis terkait via aplikasi Whatsapp atau dibahas dalam rapat forkopimda, pelaporan terhadap



setiap informasi dilakukan setiap hari, mingguan, bulanan, dan juga per-triwulan, setiap informasi mingguan merupakan kumpulan informasi yang telah diterima setiap hari dalam minggu tersebut dikumpulkan, begitupun laporan bulanan, dan per-triwulan, setiap informasi akan dijadikan satu sebagai laporan dalam format word dan diteruskan ke kepala daerah per triwulan, sebagai syarat pemenuhan Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 3.2. *Face to Face Dialogue / Dialog Tatap Muka*

Komunikasi sangat diperlukan dalam sebuah kerja sama tidak terlepas dari kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dengan adanya komunikasi yang baik lewat pertemuan langsung maka kedua pihak dapat mengetahui informasi lebih jelas terkait isu yang berkembang di masyarakat yang berpotensi dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum dan juga dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan sebagai saran kepada kepala daerah sebagai solusi dari sebuah permasalahan, namun pada kenyataannya sejauh ini pertemuan langsung yang terjadi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat hanya terjadi satu kali kegiatan pertemuan tersebut terjadi pada tahun 2023 sebagaimana yang terlihat pada gambar 2 berikut.

#### **GAMBAR 2.**



Pertemuan yang berlangsung tersebut juga merupakan perkenalan dari pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada para anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang baru dibentuk, dalam pertemuan tersebut juga belum ada pembahasan terkait isu-isu yang berpotensi menjadi gangguan keamanan, akan tetapi proses koordinasi terus dilakukan secara daring melalui aplikasi pertemuan seperti zoom dan juga aplikasi whatsapp untuk saling berbagi informasi.

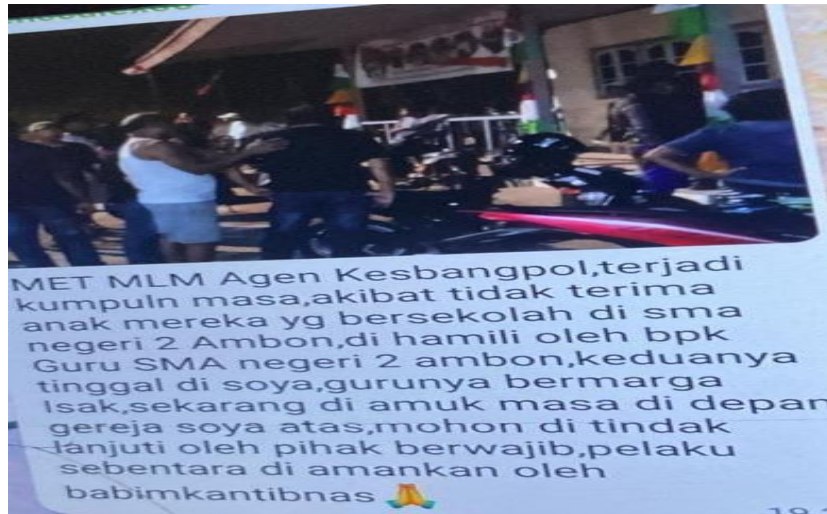
### 3.3. *Trust Building / Membangun Kepercayaan*

Kepercayaan dalam sebuah kerja sama merupakan hal yang penting, membangun kepercayaan antara dua pihak yang bekerja sama sangat memengaruhi jalannya kolaborasi, dengan adanya dua pihak yang bisa saling percaya maka proses kolaborasi akan berlangsung lebih optimal, dalam hal ini penulis menganalisis seberapa jauh kepercayaan yang sudah dibangun antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat melalui pemahaman dan juga pendekatan, berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat tergambar bahwa pemahaman anggota Forum Kewaspadaan Dini dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kedudukannya dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini masih kurang di karenakan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini yang baru dibentuk pada Tahun 2023 sesuai dengan yang terlihat pada gambar 1, namun kendati demikian Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus melakukan pendekatan dengan koordinasi dan komunikasi yang dibangun secara daring menggunakan media komunikasi seperti aplikasi whatsapp, sehingga secara perlahan para anggota Forum Kewaspadaan Dini dapat lebih memahami terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini sehingga kepercayaan diantara kedua pihak dapat tetap terjaga, adapun proses pendekatan



melalui aplikasi Whatsapp dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon dapat terlihat pada gambar 3 berikut.

**Gambar 3.**



#### **3.4. *Commitment To Process / Komitmen Terhadap Proses***

Keberhasilan sebuah kolaborasi dapat terjadi ketika semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi dapat berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan konsisten, dengan demikian untuk menganalisis komitmen yang sudah dibangun antara badan kesatuan bangsa dan politik dengan forum kewaspadaan dini masyarakat terhadap proses penyelenggaraan kewaspadaan dini di kota Ambon penulis menganalisisnya melalui 2 (dua) hal yaitu bagaimana kedua pihak saling ketergantungan dan juga rasa kepemilikan bersama atas proses kewaspadaan dini.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Cheryl. V. Tuasun. S.STP, M.Si. selaku Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, beliau mengungkapkan bahwa “sejauh ini Pelaksanaan kewaspadaan dini antara badan Kesbangpol dengan FKDM adalah saling melengkapi, koordinasi yang terjadi secara horizontal membuat sharing informasi dapat berlangsung secara maksimal sehingga keberadaan FKDM juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah”, selain itu pernyataan dari bapak Pdt. Ricardo Rikumahu. S.Th selaku ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat beliau mengungkapkan bahwa “untuk proses pelaksanaan kewaspadaan dini sendiri tentu kami bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi, dalam mendapatkan informasi kami memanfaatkan kedudukan kami masing-masing sebagai tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi dengan warga masyarakat kota Ambon, kami tidak bisa terlepas dari pemerintah Kota Ambon hal ini dikarenakan kita bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota, dan setiap isu atau kejadian yang terjadi maka kami akan saling berkoordinasi dan membahas terkait langkah langkah yang harus di ambil kedepannya”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ternyata memiliki rasa saling ketergantungan satu dengan yang lain dan juga bersama sama bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon untuk terus mengkomunikasikan data dan informasi terkait setiap isu dan kejadian yang sedang berkembang di masyarakat dan hal ini sesuai dengan yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

#### **3.5. *Share Of Understanding / Pemahaman Bersama.***

Pemahaman bersama dalam sebuah kolaborasi menunjukkan kesamaan pandangan antara pihak yang terlibat dalam sebuah kolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan, dengan adanya kesamaan dalam pandang tentu akan membuat proses kolaborasi tidak menjadi bias melainkan terfokus pada sebuah tujuan yang jelas, kolaborasi yang dibangun antara badan kesatuan bangsa



dan politik dengan forum kewaspadaan dini masyarakat juga harus demikian, pencegahan terhadap segala potensi konflik dan gangguan di masyarakat merupakan tujuan utama dari adanya penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon, penulis menganalisis sejauh mana pemahaman bersama sudah di bangun melalui 2 (dua) hal yaitu, seberapa jelas misi yang di dijalankan dan juga adanya kesamaan dalam menghadapi sebuah masalah umum.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh ibu Cheryl. V. Tuasun, S.STP, M.Si selaku Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik beliau mengungkapkan “Seperti yang diketahui bahwa salah satu tugas dari badan Kesbangpol adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan kewaspadaan dini di daerah demikian juga dengan tujuan pembentukan FKDM seperti yang tertera pada SK pembentukan bahwa FKDM juga memiliki tugas untuk melaksanakan Kewaspadaan Dini di Daerah sebagai upaya pencegahan potensi gangguan Keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, dengan demikian badan kesbangpol dengan FKDM sama sama memiliki misi untuk mewujudkan perlindungan masyarakat melalui pelaksanaan kewaspadaan dini” lebih lanjut beliau juga mengungkapkan “kami dari Kesbangpol dalam menjalankan fungsi kewaspadaan dini bertujuan untuk semaksimal mungkin menangkal potensi konflik yang terjadi, saya rasa demikian juga dengan FKDM yang baru dibentuk pada tahun 2023 dengan tujuan untuk menangkal setiap potensi konflik sosial yang terjadi, terutama mencegah kembali konflik agama agar tidak terulang kembali, mengingat Kota Ambon pernah dilanda konflik agama pada tahun 1999 yang hingga kini masih menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat Kota Ambon”, selain itu bapak Pdt. Ricardo Rikumahu, S.Th selaku ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga memberi pernyataan bahwa “memang saat terbentuk FKDM di mulai dari tahun 2023 kemarin kami memiliki tujuan dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini adalah untuk mencegah terjadinya konflik sosial seperti konflik agama yang pernah terjadi pada tahun 1999 terulang kembali”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon memiliki misi yang jelas yaitu menangkal setiap potensi gangguan konflik di Kota Ambon, selain itu juga pemahaman yang dibangun dalam kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam menghadapi masalah umum adalah mencegah terjadinya konflik sosial seperti konflik agama 1999 terulang kembali di Kota Ambon.

### **3.6. *Intermediate Outcomes / Hasil Sementara.***

Dalam sebuah kolaborasi tentu ada sebuah hasil yang ingin di capai, begitu pula dengan kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini yang bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut tentu harus ada dampak yang dirasakan masyarakat lewat kolaborasi yang sudah terjadi. Namun setelah melakukan observasi di lapangan penulis menemukan bahwa memang belum ada hasil rekomendasi kebijakan terkait isu isu yang dapat menimbulkan konflik yang dihasilkan dari pertemuan sudah dilaksanakan antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon, hal ini terjadi karena pembentukan Forum Kewaspadaan Dini yang baru saja terbentuk pada tahun 2023 yang membuat belum banyak pertemuan langsung diadakan untuk sama sama membahas isu yang sedang berkembang yang berpotensi mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sejauh ini pertemuan langsung antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru terjadi 1 (satu) kali seperti yang terlihat pada gambar 2 di atas, dan juga melalui pertemuan tersebut juga belum menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang bisa memberi dampak kepada masyarakat Kota Ambon.



### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian.**

Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sangat penting dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini hal ini dikarenakan kedua unsur tersebut merupakan landasan utama yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah yang mana lewat kolaborasi tersebut dapat di hasilkan Rekomendasi Kebijakan untuk mengatasi potensi gangguan keamanan (Wizani, Dedi.2020), namun pada kenyataannya berdasarkan fakta di lapangan kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini di Kota Ambon baru dibentuk pada tahun 2023 sehingga belum banyak pertemuan langsung yang diadakan untuk membahas isu yang berkembang yang berpotensi gangguan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon, terhitung sejak dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon baru 1 (kali) pertemuan langsung diadakan dan belum ada rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, namun kendati demikian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tetap melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik via daring melalui media komunikasi yang ada terkait pengumpulan data dan informasi di lapangan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga melakukan pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui 4 M yaitu menjangring, mengumpulkan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) (Miryanti,R,2024).

Dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ada beberapa faktor pendorong yang dapat mendukung penyelenggaraan kewaspadaan dini antara lain ; adanya koordinasi dalam memberikan informasi di lapangan, adanya anggaran untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini berupa honor (Hakim,L.2020), penggunaan teknologi informasi dalam memberikan informasi, di samping itu ada beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini seperti ; Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan sebuah isu kepada pemerintah desa/kelurahan, kondisi geografis yang sulit, dan juga masih ada ego sektoral antar instansi dalam memberikan informasi.

### **3.8. Diskusi Temuan Menarik lainnya.**

Berdasarkan fakta di lapangan yang penulis temukan, ada faktor yang menjadi pendorong yang sangat membantu dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon, yaitu dikarenakan kekurangan tenaga, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon memberdayakan masyarakat di setiap desa/kelurahan untuk menjadi perpanjangan tangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menggali informasi di lapangan terkait isu yang sedang berkembang di masyarakat, pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut di lakukan dengan membentuk Agen Kesbangpol, di samping itu ada berapa faktor yang menghambat penyelenggaraan kewaspadaan dini yaitu tidak aktifnya keanggotaan satlinmas dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini dan juga pembentukan Forum Kewaspadaan Dini yang baru dibentuk pada tingkat kota dan belum dibentuk pada tingkat kecamatan serta desa/kelurahan.

## **IV. KESIMPULAN.**

Penulis menyimpulkan bahwa kolaborasi yang telah dibangun antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan kurangnya pertemuan secara langsung dan belum dihasilkannya rekomendasi kebijakan dari kolaborasi tersebut, hal ini di karenakan selama 1 (satu) tahun dihitung dari penetapan FKDM belum banyak

pertemuan langsung yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sejauh ini baru terhitung 1 (satu) kali diadakannya pertemuan langsung yang terjadi antara kedua belah pihak sehingga belum ada rekomendasi kebijakan yang bisa dihasilkan dan dirasakan masyarakat dari kolaborasi yang sudah berjalan antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kota Ambon. Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan dapat dikemukakan beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon antara lain adanya agen kesbangpol yang membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi dilapangan, dan juga terbangunnya koordinasi dari berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini diantaranya kominda, forkopimda, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dilain sisi terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon seperti tidak aktifnya fungsi Satlinmas dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini, serta belum dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Guna mengoptimalkan kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini maka disarankan untuk lebih intens dalam menyelenggarakan pertemuan langsung antara kedua belah pihak agar dapat membahas terkait isu-isu yang dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih besar sehingga dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang bisa disampaikan untuk mencegah potensi gangguan yang terjadi, selain itu perlu untuk menetapkan Forum Kewaspadaan Dini pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta perlu untuk diberdayakan anggota Satlinmas dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon.

**Keterbatasan Penelitian.** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dan perizinan, hal ini dikarenakan penelitian ini terkait dengan fungsi intelijen yang mana setiap data tidak terpublikasi karena bersifat rahasia, dengan waktu penelitian yang singkat penulis tidak dapat mengurus perizinan lebih jauh untuk melakukan penelitian lebih dalam sehingga peneliti hanya dapat menyajikan data seadanya sesuai dengan yang telah disetujui bersama dengan informan.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work).** Penulis menyadari penelitian yang dilakukan masih berada pada tahap awal. Dengan demikian penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih jauh terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH.**

Ucapan Terima kasih terutama penulis tujukan kepada ibu Cheryl. V. Tuasun, S.STP. M.Si selaku Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, bapak Subakti Limba, S.STP selaku Kasubid Kewaspadaan Dini Dan Kerja sama Intelijen, serta bapak Pdt. Ricardo Rikumahu, S.TH selaku Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian serta memberi arahan dan bimbingan di lapangan terkait pengumpulan data dalam penelitian ini, juga tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA.**

### **Sumber Buku dan Jurnal.**

Agustina, D., & Mulyadi, E. (2020). Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019.



- Akbar, A., & Ahmad, M. (2023). Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial Di Kelurahan Warakas. *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, 2(2), 108-122.
- Amri, A. D., Ardianto, B., Elvini, N., Rahmah, T. N., Siagian, P., & Soraya, O. (2022). Kewaspadaan Dini Terhadap Paham Radikalisme di Kalangan Remaja. *BangDimas: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 12-16.
- Ansel, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543-571.
- A RIANSYAH, P. R. A. T. A. M. A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Creswell, J.W (2016). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal (PAJ)*, 4(1), 69-82.
- Miryanti, R., Anwar, S., Bintarsari, N., Yamin, M., Fitrah, E., & Darmawan, A. (2024). Peran Jurnalis Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm) Dalam Mencegah Ekstrimisme Dan Radikalisme Di Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED*, 13(1), 274-285.
- Setiabudhi, I. Ketut Rai, I. Gede Artha, and I. P. R. A. Putra. (2018) "Urgensi Kewaspadaan Dini dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7.2 (2018): 250-266.
- Sugiyono (2020). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wizani, Dedi. (2020) "Peran Kewaspadaan Dini "Intelijen" Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Didaerah."

**Sumber online.**

- <http://www.MalukuTerkini.com>. imbas bentrokan warga kawasan air salobar ini kerugiannya. Minggu, 28 Februari 2021.
- <http://www.MalukuTerkini.com>. Hendak Melerai Bentrok di Batu Merah, Pegawai Kantor Gubernur Maluku Dianiaya. Minggu, 02 Oktober 2022.
- <http://www.ambon.tribunnews.com>. 2 Kelompok pemuda di kudamati, ambon bentrok satu orang terluka hingga lapak dibakar. Senin, 06 maret 2023.10.16
- <http://www.fokusmaluku.com> Kesbangpol kota ambon buat pemetaan daerah rawan konflik. 31 Agustus 2022
- <http://www.ambon.go.id> Pj wali kota ungkap strategi pemkot dalam pencegahan dini konflik. 23 Agustus 2023